

Judul : Program revitalisasi sekolah, pembangunan fisik tidak boleh tersendat
Tanggal : Minggu, 16 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Program Revitalisasi Sekolah

Pembangunan Fisik Tidak Boleh Tersendat

ANGGOTA Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten/kota mendampingi sekolah penerima program revitalisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendampingan itu juga mencegah kegagalan proyek sejak dini.

Fikri menyoroti celah sistem swakelola yang membuat sekolah tertekan. Di awal, akar masalahnya adalah tingginya porsi Transfer ke Daerah (TKD) yang menggenus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Itu membuat Pemda menyerahkan urusan pembangunan fisik sekolah secara penuh kepada Pemerintah Pusat.

Di saat yang sama, regulasi yang kaku membuat pelaksana di lapangan takut mengambil diskresi teknis. Ketakutan itu diperparah tekanan serta intervensi pihak luar pada tim pelaksana swakelola. "Akibatnya, seluruh proses penyelesaian pekerjaan fisik di sekolah tersendat dan terhambat," terangnya, Jumat (14/8/2026).

Dia bilang, Pemerintah Pusat sebenarnya telah mengantisipasi kebocoran dana melalui sistem pelaporan daring yang mendeteksi progres hingga angka 17 persen tiap pekan. Namun, pengawasan

ini memiliki kelemahan karena audit bersifat pascakejadian. Evaluasi kerap baru dilakukan setelah negara dirugikan, sehingga mengorbankan hak belajar para siswa.

Fikri menawarkan dua langkah solusi bagi pihak terkait. Pertama, Disdik wajib memberikan pendampingan melekat sejak fase awal perencanaan agar spesifikasi ruang kelas sesuai standar. Kedua, Kementerian harus menyediakan kanal pengaduan khusus yang bersifat responsif bagi pelaksana.

Sistem laporan berkala secara daring diharapkan mampu mengatasi persoalan jika ada unsur eksternal yang turut campur. Kanal pengaduan akan menjamin keluhan pihak pelaksana tersalurkan dengan baik. "Ini memastikan masalah segera mendapat tindak lanjut positif tanpa berbuntut pada persoalan hukum di kemudian hari," terangnya.

Fikri menegaskan, jerih payah pendidik dalam menjalankan program revitalisasi swakelola harus dipandang sebagai sumbangsih bagi bangsa. Upaya ini tidak boleh menjebak para guru dalam masalah hukum. Dana pendidikan harus murni terserap untuk siswa tanpa potongan tidak resmi dari



Abdul Fikri

oknum tak bertanggung jawab.

Pemintaan biaya maupun jasa atas nama bantuan revitalisasi sarana dan prasarana dari APBN merupakan bentuk pungutan liar. Praktik itu tidak dibenarkan dan tidak boleh dipenuhi. "Dana bantuan harus digunakan secara penuh untuk keperluan revitalisasi sesuai persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)," tegasnya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi X DPR Adde Rosi Khoerunnisa mendorong Pemerintah meningkatkan anggaran revitalisasi sekolah. Kondisi fisik sekolah jadi aspek yang harus mendapat perhatian serius. Ling-

kungan belajar layak menunjang proses pendidikan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa maupun pendidik.

Komisi X DPR, kata Adde, akan terus mendorong agar kebutuhan revitalisasi sekolah ditangani secara optimal melalui dukungan anggaran yang memadai. Peningkatan anggaran itu diharapkan mampu memperluas cakupan program. "Ini tidak hanya menyelesaikan sebagian kerusakan bangunan, melainkan memperbaiki fasilitas sekolah secara menyeluruh," ucapnya.

Dorongan itu, lanjut Adde, jadi bagian dari upaya DPR memastikan pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Pembangunan juga perlu didukung keberadaan infrastruktur sekolah yang aman serta memadai. Pemerataan kualitas pendidikan nasional harus berjalan beriringan dengan pemerataan fasilitas di seluruh daerah.

Sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan di daerah maupun wilayah perkotaan patut mendapat perhatian sesuai tingkat kebutuhannya. Karena program revitalisasi diharapkan tidak berhenti pada perbaikan fisik secara parsial saja. "Ke-

giatan ini harus jadi instrumen untuk menghadirkan ruang belajar layak bagi seluruh generasi penerus bangsa," katanya.

Sebagai informasi, tahun ini Pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah di seluruh Indonesia. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut, proses perbaikan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola oleh satuan pendidikan bersama masyarakat setempat. Proyek ini menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja dalam rentang waktu tiga sampai delapan bulan.

Dikatakan, Pemerintah berkomitmen untuk menambah sasaran sebanyak 60 ribu satuan pendidikan dalam program revitalisasi gedung. Program itu mencakup renovasi sekolah dari jenjang TK hingga SMA. Capaian tahun ini diklaim melampaui target awal sebesar 11.744 sekolah dengan total alokasi anggaran Rp 14 triliun.

Hingga pertengahan Juni 2026, Pemerintah telah menyelesaikan sekitar 70 persen dari target awal revitalisasi 11.744 sekolah. Beberapa fisik bangunan gedung di antaranya diselesaikan pada bulan Juli atau Agustus. "Fasilitas itu sudah diresmikan untuk menyambut dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027," tandas Mu'ti. ■ **PYB**